

SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN BPK SUMBAR

2 0 2 4

KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	10
Singgalang	
Pos Metro	

22 23 24 25 26 (27) 28 29 30

							-							1.5	16	17
1	2	3	4	5	6 7	8	9	10	13	1	12	13	14	15	10	17
Bu	lan						_									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1:	L	12				
	Tar 1		Tanggal 1 2 3 Bulan 1 2 3	Tanggal 1 2 3 4	Tanggal 1 2 3 4 5	Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 Bulan	Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 Bulan	Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bulan	Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bulan	Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1: Bulan	Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bulan	Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bulan	Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemko Fasilitasi BPK Lakukan Pemeriksaan Penyelenggaraan JKN

A Yani, Padek—Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen memfasilitasi Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Padang.

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar saat menerima kunjungan tim BPK RI Perwakilan Sumbar di kediaman resminya, Senin (26/8).

Andree berharap, hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 20 hari ke depan, menjadi dasar bagi Pemko Padang untuk bergerak lebih baik lagi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

"Kita akan fasilitasi BPK untuk pemeriksaan ini. Semoga ke depan Pemko Padang dapat melakukan tindak lanjut dan evaluasi atas semua saran yang diberikan," ujarnya didampingi Pj Sekda Yosefriawan.

Sementara itu, Pengendali Tek-



PENYERAHAN: Pj Sekko Padang Yosefriawan saat menerima kunjungan BPK RI.

nis BPK RI Perwakilan Sumbar Yunaldi menyebutkan pemeriksaan ini dalam rangka memeriksa pertanggungjawaban Pemko Padang terkait

penyelenggaraan JKN Semester 2 di

Kota Padang.

"Penyelenggaraan JKN tersebut akan kita evaluasi seperti di tingkat Puskesmas, hinggarumah sakityang sudah bekerja sama dengan BPJS

Kesehatan. Kita akan inventarisasi masalah yang muncul terkait pendanaan, termasuk kepesertaan yang juga bekerja sama dengan Dinas Sosial," ujarnya. (eri)